

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (Studi di SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri)

Taufiq Rahman Ilyas, Tjahjanulin Domai, Muhammad Shobaruddin
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: topiq.ismaya@yahoo.com

Abstract: *Evaluation Implementation of School Operational Assistance Program (Studies on SDN Bulusari Tarokan Kediri) Organizing the implementation of a program is not always be balanced with success on the intended target of the main objectives. As well as organizing the implementation of the School Operational Assistance (BOS) at the elementary school (SD). Consistent with the program that has been running more than about eight years from 2005, this program has actually made many contributions, particularly in the education service. School Operational Assistance (BOS) to be the main instrument in the teaching and learning activities schools. But even then on the other side dimensions there are real problems in the implementation of the School Operational Assistance (BOS) in elementary school (SD).so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success. so what is the vision and mission of the program objectives are not to achieve success.*

Keywords: *evaluation, The School Operational Assistance (BOS)*

Abstrak: **Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (studi pada SDN Bulusari Tarokan Kabupaten Kediri)** Implementasi penyelenggaraan suatu program tidak selamanya selalu diimbangi dengan keberhasilan pada sasaran tujuan utama yang dituju. Seperti halnya implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan program yang telah berjalan kurang lebih sekitar delapan tahun dari tahun 2005 program ini sebenarnya telah memberikan banyak kontribusi, khususnya pada layanan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi instrument utama dalam terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian pada dimensi sisi yang lain masih saja terdapat permasalahan pada implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sehingga apa yang menjadi visi misi dari sasaran program tersebut belum mencapai keberhasilan

Kata kunci: *evaluasi, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).*

Pendahuluan

Pendidikan adalah sektor wilayah yang terpenting dari sebuah input pembangunan secara umum, karena merupakan fondasi dasar fundamental yang utama dalam suatu paradigma pembangunan, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia seperti yang ada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang di-

miliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan system pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain dalam Renstra Ke-mendikbud

(2011) menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

- (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
- (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
- (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan system pendidikan yang meliputi (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pem-budayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang mem-berikan keteladanan dan mampu mem-bangun kemauan serta mengem-bangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang mengenai peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh.

Dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada berbagai banyaknya kompleksitas permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada

tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 menempati peringkat 124 dari 187 negara. Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/ sederajat maupun Sekolah Menengah Atas/ setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru/ penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan kegiatan ekstrakurikuler atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan.

Ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi implementasi terhadap program BOS adalah karena di daerah Kabupaten Kediri tepatnya di SDN Bulusari kecamatan tarokan berdasarkan informasi dari media lokal daerah setempat menemukan temuan adanya indikasi permasalahan pada regulasi pelaksanaan penyelenggaraan dana BOS hal ini sesuai dengan kutipan berikut, Adanya penggunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar siswa sebagai penerima dana BOS (Radar Kediri, 17 Mei 2012) Adanya temuan bahwa di SDN Bulusari terjadi kesalahfahaman pengertian mengenai pemanfaatan BOS oleh pihak pengelola dana BOS dengan para wali murid, dimana wali murid masih menganggap BOS sebagai subsidi khusus yakni diperuntukan kepada dan khusus bagi siswa miskin yang menerima padahal kegunaan BOS tersebut peranannya men-cakup semua proses kegiatan pendidikan termasuk membiayai siswa

miskin (Radar Kediri 1 september 2012). Dengan melihat permasalahan diatas tentunya menarik apabila Penulis meneliti mengenai evaluasi implementasi pemanfaatan BOS, tidak diberikannya langsung dana BOS kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola langsung oleh sekolah bersamaan dengan pengawasan dari komite sekolah, selain itu pelaksanaan program BOS setelah sekian lama dari tahun ketahun mendapatkan evaluasi tetapi kenyataannya keefektifan dari tujuan sasaran yang dituju masih belum maksimal, banyaknya tantangan dan kendala dalam transparansi serta akuntabilitas dari berbagai lembaga yang menangani masih banyak perlu dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga setidaknya sedikit banyak dapat mengetahui seberapa besarkah manfaat dan cakupan, pemerataan dari anggaran BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu.

Tinjauan Pustaka

Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, Efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang telah diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. (Ralp Tyler, 1950 dalam Arikunto, 2007, h 38) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, Efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan. Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan

untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut (Stake, 1967, Stufflebeam, 1959, Alkin 1969 dalam Arikunto, 2008, h 49) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaitu:

- a. Konteks
- b. *Input*
- c. Proses implementasi
- d. Produk

Bridgman dan Davis (dalam Yusuf, 2000, h 76) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu:

- a, Indikator *input*
- b. Indikator *process*,
- c. Indikator *outputs*
- d. Indikator *outcomes*.

Penilaian Evaluasi Kinerja Program.

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program. Evaluasi proses dilakukan dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian dalam pelaksanaan kegiatan, memonitor kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghambat dan menimbulkan kesulitan yang tidak diharapkan, menemukan informasi khusus yang berada diluar rencana; menilai dan menjelaskan proses secara aktual. Selama proses evaluasi, evaluator dituntut berinteraksi dengan staf pelaksana program secara terus menerus (Endang Mulyatiningsih, 2011, h 130-131).

Tujuan utama evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan dan memutuskan hasil yang telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum (Endang Mulyatiningsih, 2011, h 132). Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009, h 22), menyatakan ada empat kemungkinan kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu:

- a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
- c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d. Menyebarkan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. (dalam Gaffar, 2000, h 10) yang dimaksud pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Sedangkan (Sudjana, 2002, h 36) mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ada Kerja sama yang terjalin bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk dalam usaha tertentu.

Menurut (Nanang, 2004, h 78) Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah,

pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi peran sekolah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian adalah kegiatan dalam rangka memberikan pemecahan atas suatu permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenarannya suatu pengetahuan. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode.

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Proses evaluasi implementasi program BOS
 1. Supervisi pemantauan dan pengawasan implementasi program BOS
 - Pemantauan dan pengawasan internal
 - Pemantauan dan pengawasan eksternal
 2. Pelaksanaan evaluasi program BOS di sekolah
 - aspek masukan (*input*)
 1. Jumlah anggaran
 2. Jumlah siswa di sekolah
 - 3. SDM pelaksana program BOS di sekolah
 - Aspek proses (*Procces*)
 - a. Pengelolaan atau proses penyelenggaraan program BOS di Sekolah
 - b. Indikator pencapaian evaluasi BOS di Sekolah
 - Indikator pada pencapaian kualitas mutu pendidikan di sekolah
 - Indikator pada peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sarana dan prasarana di sekolah
 - Indikator pada peningkatan layanan pendidikan siswa
 - Pemahaman wali murid mengenai masalah persepsi penggunaan BOS di sekolah
 - c. Faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi program BOS

Pembahasan

1. Analisis Hasil Penelitian Mengenai Proses Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar), Instruksi evaluasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Petunjuk teknis pengelolaan BOS yang di dalamnya meliputi evaluasi melalui tahapan pemantauan dan supervisi. Pemantauan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) apakah pada proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan BOS SD atau belum. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai dimanakah atau seberapa besarkah manfaat beserta cakupan dari Rintisan program BOS SD (Sekolah Dasar) sendiri bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah atau hambatan hambatan yang dialami serta mencari solusi beserta pemecahan masalah sekaligus. Hasil pemantauan dan supervisi selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan perumusan perencanaan program BOS SD (Sekolah Dasar) di masa yang akan datang atau selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh bagian komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SD serta dinas pendidikan di tingkat propinsi.

a. Supervisi pemantauan pelaksanaan program BOS

1. Pemantauan Internal

-Tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah

Pada proses evaluasi ini meliputi pemantauan dan pengawasan di tingkat Komite Sekolah. Komite sekolah selaku partner atau owner kerjasama dengan pihak sekolah melakukan pemantauan beserta pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan di tiap tiap sekolah secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam proses penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir

program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi yang membawahi serta menaungi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau Direktorat Pembinaan SD (Sekolah Dasar) hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siagian (2008: h 112) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan efektif.

-Tingkat Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota melalui Pengawas Sekolah

Pada proses evaluasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disini berfungsi melaksanakan pemantauan langsung sebagai bagian tugas dari rutinitas pembinaan terhadap tiap tiap sekolah yang melaksanakan program programnya. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar).

2. Pemantauan Eksternal

Pada proses pemantauan pengawasan ini direktorat Pembinaan SD (Sekolah Dasar) disini melaksanakan pemantauan ke pengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program Rintisan BOS SD, untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan dari program Rintisan BOS SD (Sekolah Dasar). Dinas Pendidikan Propinsi di sini melalui peranannya berfungsi untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sekolah berdasarkan pada sampel atau contoh dari fakta yang sudah terdata untuk kemudian memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan beserta ketercapaian dari program program di SD (Sekolah Dasar) Bahwa kegiatan evaluasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya (Arikunto, 2007, h.1). Dengan melihat proses pemantauan secara internal dan eksternal di atas tentunya proses evaluasi selalu melihat pada kontekstual struktur

hearakis di mana setiap pemantauan dan pengawasan mengerucut dari berbagai tingkatan yakni dari pengawasan tingkat sekolah oleh komite sekolah kemudian dari tingkat dinas pendidikan melalui pengawas atau penilik sekolah. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu adanya evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja suatu program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar, 2004, h 3), bahwa evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek tersebut.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program BOS di sekolah

Evaluasi program BOS di sekolah bukanlah merupakan kegiatan akhir. artinya, kegiatan evaluasi ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan atau lebih tepat bila dikatakan siklus berkelanjutan sebab tidak berhenti sampai terkumpulnya data atau informasi, tetapi data atau informasi itu digunakan sebagai dasar kebijakan atau keputusan dalam pengembangan program BOS selanjutnya. Karena itu kegiatan evaluasi program BOS selalu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah serta metoda atau strategi yang harus digunakan. Tahapan prosedur evaluasi, yaitu meliputi serangkaian kegiatan yang berurut sebagai berikut:

a. Identifikasi Tujuan yang akan Dicapai

Melakukan identifikasi terhadap tujuan yang ingin dicapai sangat penting karena memberikan arah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Artinya selama melakukan evaluasi tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Langkah awal kegiatan evaluasi adalah menetapkan parameter atau batasan-batasan yang akan dievaluasi, dapat dipusatkan pada program BOS secara keseluruhan atau pada tujuan khusus secara terpisah-pisah. Tujuan itu hendaknya jelas, singkat, operasional dan dapat diukur tingkat Efektivitasnya.

b. Pengembangan rencana evaluasi:

Pengembangan rencana evaluasi merupakan langkah lanjutan setelah me-

netapkan tujuan yang ingin dicapai. Komponen-komponen rencana evaluasi program BOS yang perlu dikembangkan antara lain:

1. Data atau informasi yang dibutuhkan.
2. Alat pengumpulan data yang digunakan.
Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi.
4. Personel pelaksanaan.
5. Waktu pelaksanaan.
6. Kriteria penilaian.
7. Bagaimana pelaporan dan pada siapa laporan itu disampaikan.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah rencana itu disusun dan disetujui, pelaksanaan evaluasi program BOS bergantung pada cara/metoda yang digunakan. Prinsip pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang telah direncanakan sehingga terjadi berinteraksi antara faktor yang satu dengan lainnya dan dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi dianggap sangat penting sebab langkah ini merupakan bentuk konkrit sikap akuntabilitas atas program dan hasil kegiatan yang telah dilakukan seorang konselor beserta staf yang lainnya. Hasil kegiatan evaluasi yang baik adalah yang dapat memberikan sumbangan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan keputusan selanjutnya. Program BOS itu diganti, berlanjut atau dikembangkan semata-mata berdasarkan hasil evaluasi dengan melinat pada tolok ukur efisiensi dan indikator terdahulu.

Sesuai dengan wawancara dipenyajian data berdasarkan penuturan Kepala sekolah SDN Bulusari Tarokan, Mudhofir, S.Pd, yang memaparkan pendapatnya sebagai proses evaluasi pengelolaan atau penyelenggaraan BOS kami selalu melihat dan berpandangan pada tolok ukur proses pengelolaan atau penyelenggaraan BOS di tahun tahun sebelumnya dimana melakukan pengkajian penilaian dari setiap pengawasan berdasarkan indikator indikator tingkatan pencapaian oleh sekolah terhadap program BOS yang sudah dilaksanakan kemudian berdasarkan penilaian kami melakukan

pengukuran dengan membandingkan indeks pencapaian pelaksanaan terdahulu untuk mengetahui sampai dimana dan sejauh manakah keberhasilan Efektivitas dari penerapan evaluasi terhadap keberhasilan suatu program apakah berjalan sesuai perencanaan atau belum. Pernyataan di atas sesuai dengan (Griffin dalam Tilaar & Nugroho, 2008, h 69.) yang menyatakan Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. evaluasi selalu didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Evaluasi pada aspek mejerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu adanya evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat dalam (Arikunto dan Jabar 2004, h 3) bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pernyataan ini sesuai dengan diberlakukannya restrukturisasi pada armada pengelola BOS yakni evaluasi pada kinerja bendahara, pengawasan komite dan supervisi oleh kepala sekolah pada proses penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan program BOS di sekolah.

Evaluasi pemanfaatan BOS. Pada evaluasi pemanfaatan BOS di sini meliputi penggunaan fungsi BOS sebagai biaya pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. (dalam Gaffar, 2000, h 10) yang dimaksud pembiayaan pendidikan ini adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Kemudian (Sudjana, 2006, h 36) mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan

adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Kepala sekolah SDN Bulusari Tarokan Bpk Mudhofir, SPD yang memaparkan pendapatnya yakni keberadaan BOS sebagai penunjang dalam proses terselenggarakannya suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah sangatlah dominan peranannya maka dari itu kontribusi BOS sebagai biaya pendidikan sudah cukup mewakili dan mengcover dari pengeluaran anggaran sekolah selain dari APBD.

3.Efektivitas evaluasi BOS di sekolah

Secara umum, untuk mengukur penilaian keefektifan suatu evaluasi kinerja program menurut (Keban, 2006, h 222) telah dikembangkan dua model pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai dari proses dan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Sementara itu tolok ukur dari kedua pendekatan di atas tersebut adalah tetap berlandaskan pada sejauh manakah Efektivitas evaluasi terhadap pencapaian tujuan suatu keberhasilan program berjalan. Dua dimensi yang menjadi ukuran disini ialah kontribusi manfaat dan partisipatif sumber daya pelaksana penyelenggara pengelolaan BOS. Apabila melihat dari aturan BOS proses penyelenggaraan program BOS tidak secara tegas ditentukan apakah BOS ini untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BOS cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat program BOS. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BOS termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Berdasarkan ketentuan (panduan BOS) dana BOS dikelola oleh Kepala Sekolah, Guru/tenaga administrasi. Uang dikirim langsung ke nomor rekening sekolah oleh BRI sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Sekolah boleh menggunakan BOS tersebut dengan berbagai jenis kegiatan berdasarkan

RAPBS yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah, RAPBS sebagai persyaratan untuk menerima BOS harus mendapat persetujuan Ketua Komite Sekolah. Namun, hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hal ini terjadi hampir seluruh sekolah. Guru dan orang tua wali murid harusnya selalu diajak dalam proses penyusunan RAPBS, sedangkan Komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Hal yang demikian inilah yang dapat menjadikan fungsi kontrol dapat berjalan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil kajian dari Laporan Per-tanggung-jawaban Keuangan BOS dari SDN Bulusari hampir sebagian besar dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan, membayar tenaga honorer, GTT, PTT dan Tenaga Harlep, Belanja barang dan jasa, Kegiatan Belajar mengajar, Kegiatan Kesiswaan, Kegiatan Pemeliharaan. Dari komponen tersebut pos yang paling besar adalah (30%) untuk pembayaran tenaga honorer /GTT/ PTT, Tenaga Harlep, (25%) untuk belanja barang jasa dan (20%). untuk kegiatan belajar mengajar, (10%) kegiatan kesiswaan dan (15%) pemeliharaan gedung. Pengelompokan dan pengklasifikasian hal ini sesuai dengan pernyataan (Nanang, 2004, h.78) yang menjelaskan bahwa berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pem-binaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi peran sekolah.

2 Faktor faktor penghambat dan pendukung evaluasi implementasi pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan SDN Bulusari

Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer

keberadaannya, program BOS harusnya mendapat berbagai respon positif, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, ternyata program BOS sendiri menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah.

-Faktor internal

Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke proses penyusunan Laporan pertanggung jawaban dana BOS yang selalu ditentukan waktu dateline laporan penyelesaiannya. Masih belum optimalnya pengelolaan BOS oleh pihak sekolah karena keberadaan dana BOS yang ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan sekolah yang utama yakni, membiayai dan memfasilitasi pendidikan siswa

-Faktor eksternal

Masih adanya anggapan dan pemahaman dari para orang tua wali murid bahwa Program BOS adalah bantuan khusus untuk siswa miskin padahal BOS sendiri adalah bukan sekedar bantuan khusus namun mencakup untuk biaya operasional keseluruhan bagi semua pelayanan pendidikan siswa di sekolah.

Penutup

Efektivitas evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah berpendekatan pada perspektif manfaat dan partisipatif. Peranan SDM dalam mengelola BOS apakah mencapai hasil yang diinginkan atau belum.

Analisis dari pengelompokan pemanfaatan penggunaan Dana BOS menjadi indikator utama melihat fungsi kontrol peranan SDM dalam mengelola anggaran. Pada dimensi manfaat dapat disimpulkan bahwa peranan BOS sangat efektif membantu keuangan sekolah. Adanya evaluasi program BOS di sekolah pada tiga tahun ajaran terakhir men-ciptakan suatu tekad yang bagus dari pihak pengelola program BOS dan peran aktif pihak terkait beserta para wali murid mengenai perbaikan pelaksanaan program BOS di

sekolah. Transparansi yang semakin jelas kepada wali murid mengenai pelaksanaan proses pemanfaatan BOS di sekolah, pemahaman fungsi peranan BOS yang sesungguhnya kepada wali murid bahwa BOS ialah subsidi umum dan bukan saja sebagai subsidi khusus bagi siswa miskin melainkan memfasilitasi dan mengcover biaya biaya kegiatan belajar mengajar di

sekolah secara keseluruhan termasuk siswa miskin. Sedangkan pada dimensi partisipatif diberlakukannya evaluasi pada pelaksanaan BOS lebih memperbaiki sisi fungsi kontrol atau peranan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan program BOS di sekolah tersebut telah berjalan sesuai prosedur juklak juknis yang dijadikan pedoman.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. (2008) **Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Djudju, Sudjana. (2006) **Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah**. Bandung, Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2004) **Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Keban, Yermias T. (2008) **Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu**. Gava Media, Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008) **Kebijakan Pendidikan**. Yogyakarta, PustakaPelajar.
- Mulyatiningsih, Endang (2011) **Evaluasi Proses Suatu Program**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yunanda, Ari. (2010) **Evaluasi Program Pendidikan pada Pendidikan Dasar**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Renstra Kmendikbud Mengenai Pembangunan Pendidikan (2011)** [Internet] Available from: <www.kemendikbud.go.id> [Accessed: 07 Februari 2013]
- Radar Kediri. (2012) **Tentang Masalah penyelenggaraan implementasi BOS di Kabupaten Kediri**.